



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAS MASRIAH
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 500784

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.963.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m²/90 m² di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 550 m² di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. Tanah Seluas 616 m² di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 308.000.000
4. Tanah Seluas 810 m² di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000
5. Tanah Seluas 400 m² di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 168 m² di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m²/226 m² di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 379.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



3.	MOTOR, N MAX YAMAHA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.	
	13.000.000	
4.	MOTOR, YAHAMA MIO SOUL 2SX Tahun 2017, HASIL SENDIRI	
	Rp. 5.000.000	
5.	MOBIL, TOYOTA RAISE A250RA-GBVVJ 1.0T S CVT TSS Tahun	
	2021, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000	
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 187.000.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp. ---
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp. 50.489.540
F.	HARTA LAINNYA	Rp. ---
Sub Total		Rp. 4.579.489.540
III. HUTANG		Rp. 852.518.166
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp. 3.726.971.374

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.